



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014**

PERIHAL

**PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014
PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 412/KPTS/KPU/TAHUN 2014**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON DAN
PIHAK TERKAIT
(III)**

J A K A R T A

RABU, 28 MEI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01-01, 02-10, 03-05, 04-03, 05-14, 06-09, 07-06, 08-15, 09-04, 10-07, 11-08, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
DAN PERKARA NOMOR 01-11, 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014

PERIHAL

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014

PEMOHON

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Partai Nasdem | 8. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| 2. Partai Hanura | 9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 3. Partai Golkar | 10. Partai Demokrat |
| 4. Partai Keadilan Sejahtera | 11. Partai Amanat Nasional |
| 5. Partai Bulan Bintang | 12. Partai Kebangkitan Bangsa |
| 6. Partai Persatuan Pembangunan | 13. Partai Damai Aceh |
| 7. Partai Gerindra | 14. Partai Nasional Aceh |

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon dan Pihak Terkait (III)

Rabu, 28 Mei 2014, Pukul 11.11 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan
Fadzlun Budi S.N.
Sunardi
Cholidin Nasir
Saiful Anwar
Dewi Nurul S.
Rizqi Amalia
Hani Adhani
Achmad Edy S.
Wiwik Budi W.
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Ery Satria
Abdul Ghoffar
Irfan Nurahman
Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Taufik Basari
 2. Ridwan Syaidi Turigan
2. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Teguh Samudera
3. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Samsul Huda
 2. Antoni Hatane
 3. M. M. Din Toatubun
 4. Gamal
4. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Fauzan
 2. Mahfud
 3. Sugiono
5. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Abdurahman Tardjo
6. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. M. Hadrawi Ilham
7. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Eva Yulianti
 2. Habiburochman
8. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Saepudin Umar
9. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Sirra Prayuna

10. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Hinca Pandjaitan
11. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Didit Supriyanto
 2. Sulistyowati
12. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 12-02/PPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. M. Anwar Rachman
13. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Kamaruddin
14. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Sayuti Abubakar
15. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 01-01/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Andi Muhammad Asrun
16. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 02-10/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Kristianto
17. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 03-05/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Misbahuddin
 2. Syamsudin
 3. Adi Mansyur
18. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 04-03/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. M. Ichsan
 2. Edi Sugiarto
19. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 05-14/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Baginda S.
20. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 06-11/PHPU-DPRD/XII/2014:
 1. Laksono

2. Akhmad Laksono
3. Nasrudin

21. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 07-06/PHPU-DPRD/XII/2014:

1. Lista H.

22. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 08-15/PHPU-DPRD/XII/2014:

1. Rio Rama

23. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 09-04/PHPU-DPRD/XII/2014:

1. Risa Mariska
2. Pandi Firasadi

24. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 10-07/PHPU-DPRD/XII/2014:

1. Amam
2. Yustian Dwi

25. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 11-08/PHPU-DPRD/XII/2014:

1. Didik Supianto

26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 12-02/PHPU-DPRD/XII/2014:

1. Robikin
2. Moctar Jedan

27. Termohon:

1. Agus Supriyatna
2. Zawan Salaman
3. Benger Manahan Silitonga
4. Evi Novia Ginting
5. Sepmiwawalma
6. Aries Munandar
7. Kasmantan
8. Dewa Raka Sandi
9. Ridwan Hadi
10. Buchari Mahmud

28. Kuasa Hukum Termohon:

1. Rasyid Alam Perkasa Nasution
2. Ali Nurdin

3. Guntoro
4. Safrani Riyadi
5. Muhammad Alfandi
6. Dr. Absar Kartabrata
7. Dedi Mulyana
8. Abdul Kodir
9. Subagyo Ari Darmo
10. Arie Achmad
11. Muh. Hikmat S.
12. Ridwan
13. Riza

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 01 sampai dengan 012/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dan Perkara 01-02/PHPU.D-DPRD/XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya mau absen lebih dulu. Perkara Nomor 1 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 02?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TEGUH SAMUDERA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 03?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAMSUL HUDA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

04?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ZAINUDIN PARU

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA
05?
10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ABDURAHMAN TARDJO
Hadir, Yang Mulia.
11. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hadir. 06?
12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M HADRAWI ILHAM
Hadir, Yang Mulia.
13. KETUA: HAMDAN ZOELVA
07?
14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HABIBUROCHMAN
Hadir, Yang Mulia.
15. KETUA: HAMDAN ZOELVA KUASA
08?
16. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAIFUDIN UMAR
Hadir, Yang Mulia.
17. KETUA: HAMDAN ZOELVA
09? 09?
18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA
Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 10, Perkara Nomor 10?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HINCA PANDJAITAN

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

11?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARANOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SULISTIAWATI

Hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: HAMDAN ZOELVA

12?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ANWAR RACHMAN

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Perkara 01 PHPU dari Aceh?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: KAMARUDDIN

Kami dari PDA, hadir, Yang Mulia.

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 02?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SAYUTI ABUBAKAR

Hadir, Yang Mulia.

28. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Hadir semua. Termohon?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hadir, Yang Mulia.

30. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Bawaslu? Tidak hadir. Baik. Agenda sidang hari ini adalah ... ya, sidang hari ini adalah menerima dan mendengarkan jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait.

Saya mau tanya kepada Pihak Termohon, apakah sudah memasukkan jawaban Termohon kepada Kepaniteraan?

31. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sudah, Yang Mulia.

32. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah, ya. Ini Pihak Terkait saya sampaikan saja yang sudah diterima oleh Mahkamah, ya. Keterangan dari Pihak Terkait, Partai Nasdem sudah mengajukan, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia, Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Aceh ... Maaf, Partai Damai Aceh, ya. Ini nama lama itu, ada dulu Partai Damai Sejahtera, lupa. Partai Damai Aceh, ya.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar. Apakah masing-masing Para Pemohon sudah mendapatkan keterangan dari Termohon?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-14 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. HADRAWI ILHAM

Belum, Yang Mulia.

36. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum? Semua Belum. Apakah masing-masing Para Pemohon dan Termohon sudah menerima keterangan dari Pihak Terkait?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-14 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. HADRAWI ILHAM

Belum, Yang Mulia.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum. Tapi ada yang sudah?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-14 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. HADRAWI ILHAM

Belum, Yang Mulia.

40. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum. Sudah ada? Ya. Begini saja, ya. Para Pemohon, jadi biar tidak ... apa di sini ... karena banyak sekali. Langsung dapat mengambil jawaban dari Termohon di Kepaniteraan, ya. Jadi para ... seluruh Para Pemohon dapat mengambil jawaban di Kepaniteraan. Begitu juga Para Pemohon dapat mengambil keterangan Pihak Terkait juga di Kepaniteraan.

Kemudian yang selanjutnya, sama dengan Para Pemohon, jawaban Termohon juga dianggap sudah dibacakan, tidak perlu dibacakan. Begitu juga dengan Pihak Terkait, ya. Pihak Terkait juga tidak perlu dibacakan keterangan Pihak Terkait dan dianggap sudah dibacakan, ya. Nanti dapat diambil semuanya di Kepaniteraan.

Jelas, ya. Tadi dari sini dulu, kita urut.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ROBIKIN

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, kami sudah menyampaikan jawaban untuk perseorangan. Dan untuk jawaban ... keterangan Pihak Terkait dari PKB sedianya hari ini kita sampaikan, tapi tadi pagi kita sampaikan di Kepaniteraan tidak diterima. Diminta agar kami menyampaikan melalui forum persidangan. Begitu pula dengan alat-alat bukti kami, dimohon diperkenankan agar kami menyampaikan melalui Kepaniteraan.

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sekarang diserahkan di Kepaniteraan habis sidang, ya. Semuanya diserahkan kepada Kepaniteraan.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ROBIKIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Biar juga Pemohon yang lain dapat menerima juga keterangan Pihak Terkait dari Pihak Terkait yang lain, ya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia.

46. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dari Partai Nasdem. Jadi kami tadi sudah ... untuk pihak ... sebagai Pihak Terkait, kami sudah mengajukan permohonan untuk menarik permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait sepanjang untuk keanggotaan DPR RI Dapil Papua, kami sudah ajukan itu.

48. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini dari partai?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Nasdem.

50. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nasdem. Nasdem menarik?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Menarik permohonan sebagai Pihak Terkait untuk Dapil Papua.

52. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Untuk seluruhnya?

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dapil Papua, Pak.

54. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, untuk dapil Papua. Sebagai Pihak Terkait untuk keanggotaan DPR RI.

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, jadi menarik permohonan sebagai Pihak Terkait untuk anggota DPR RI?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini perseorangan atau partai politik?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ini partai politik, Pak.

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Karena ada juga perseorangan dari yang bersangkutan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami ajukan sebagai partai politik.

61. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Partai politik, baik.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan kemudian untuk Partai Nasdem, ada tambahan keterangan Pihak Terkait, tadi kami mengajukan juga di bawah tetapi dibidang diajukan dalam sidang.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Oleh karena itu, sama seperti yang lain.

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Jadi sekali lagi untuk penegasan. Keterangan Pihak Terkait langsung diserahkan kepada Panitia setelah sidang ini selesai di Kepaniteraan, ya.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Izin, Yang Mulia.

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Partai Amanat Nasional.

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari PAN, ya.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Dibelakang. Pihak Terkait, di sini, Yang Mulia.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Oh pindah?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya, main jadi Pihak Terkait, Yang Mulia.

75. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh. Oh, sudah ke sana, oh begitu, ya, ya.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Terpaksa harus berpisah hari ini.

77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan ada sedikit perbaikan yang sudah kami serahkan kemarin di dalam keterangan Pihak Terkait.

Itu untuk Dapil Bengkulu pemohonnya Partai Golkar. Asli sudah benar 10 rangkap juga sudah benar, tapi ada satu rangkap yang masih menggunakan yang lama, sehingga ada perbaikan sebetulnya sudah diperbaiki, hanya satu rangkap yang belum terjilid, sehingga kami mohon juga bisa diajukan.

Kemudian dari Jabar 6 itu (...)

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tunggu dulu. Tadi apa ... tadi yang pertama?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Bengkulu.

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bengkulu, ya?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Pemohonnya Partai Golkar.

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bengkulu untuk DPR RI atau apa?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

DPR RI.

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bengkulu DPR RI, ya. Terus?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Kemudian Jawa Barat 6 juga DPR RI, pemohonnya Partai Demokrat, alat buktinya juga kemarin daftarnya belum terjilid, sehingga kami ajukan menyusul.

Kemudian Jawa Tengah 10 DPR RI juga, ada satu tabel yang belum tercantum akan kami cantumkan, ini internal.

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jabar 10?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Jateng 10.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jateng, Jateng?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Ya.

91. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Kemudian yang terakhir adalah Jawa Timur 5, pemohonnya Partai Hanura. Ini ada di dalam tabel masih tertulis PKS yang seharusnya Hanura.

93. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: DIDI SUPRIYANTO

Itu saja, terima kasih.

95. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Jelas, ya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon.

97. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon ya, silakan.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kami mau klarifikasi saja mengenai keterangan dari Pihak Terkait, apakah kami terima dari Kepaniteraan juga?

99. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya langsung, ya. Diterima juga dari Kepaniteraan, ya. diserahkan dan diterima di Kepaniteraan, ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Izin, Yang Mulia.

101. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: UTOMO KARIM

Demokrat. Tadi disampaikan untuk mendapatkan fotokopi atau dari Termohon dan Terkait, tapi kalau fotokopinya sudah habis, apakah bisa kita ambil, kita fotokopi di luar atau bagaimana, Pak? mengingat ini kan partai banyak sekali, Pak. Mungkin yang disiapkan oleh Termohon dan Terkait hanya 12 rangkap. Terima Kasih.

103. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti, khawatir ... harus yang dari Kepaniteraan, ya. Harus dari Kepaniteraan karena khawatir nanti tambah-tambah, kurang-kurang, enggak ngerti kita, ya. Jadi itu dikhawatirkan begitu, jadi yang dari Kepaniteraan lah, ya.

Ya, sekarang kita mau sahkan dulu alat bukti Pemohon, bukti tertulis, ya. Untuk Termohon dan Pihak Terkait belum karena masih diverifikasi sedemikian rupa, ya. ini baru Pemohon.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

Mohon izin, Yang Mulia.

105. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

PKS, Yang Mulia.

107. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, PKS.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

Pihak Terkait. Mohon izin, Yang Mulia. Kami ada perbaikan untuk selaku Terkait di daerah Sulawesi Tenggara 3.

Didalam keterangan kami, ada kami perbaiki pada petitum, Yang Mulia. Halaman 7. Dalam petitum dalam poin (...)

109. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eenggak, ini murni Pihak Terkait, ya?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

Terkait, Yang Mulia.

111. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Terkait, ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

Sulawesi Tenggara 3, Yang Mulia.

113. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He eh.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

Dalam petitem kami dalam poin 3, tertulis angka 11.173, seharusnya 12.173. Sesuai yang termuat dalam pokok perkara dan dalam alat bukti, Yang Mulia.

115. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi ini koreksi, ya untuk yang lain. Di Sultra 3 berarti DPD Provinsi, ya?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: M. ICHSAN

Ya, Yang Mulia.

117. KETUA: HAMDAN ZOELVA

DPD Provinsi, tertulis 11.173.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD LEKSONO

Seharusnya 12.173.

119. KETUA: HAMDAN ZOELVA

12.173.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD LEKSONO

Suara. Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD LEKSONO

Izin, Yang Mulia. Dari PPP.

123. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya. Pihak Terkait?

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD LEKSONO

Pihak Terkait, Yang Mulia. Izin konfirmasi. Kami dari Pihak PPP untuk Pihak Terkait perseorangan, untuk surat persetujuan sudah kami siapkan untuk ... kemarin belum sempat diserahkan, Pak Ketua. Itu yang pertama untuk surat persetujuan perseorangan.

Yang kedua, ada sedikit nanti izin untuk tambahan perbaikan terhadap Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) DPR RI. Karena masih ada yang belum dimasukkan ke poin-poin tertentu, Pak Ketua. Terima kasih.

125. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kenapa, kenapa masalahnya?

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD LEKSONO

Ya, Pak Ketua?

127. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, apa masalahnya?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD LEKSONO

Karena kemarin hari terakhir buru-buru, sedikit tambahan tapi kalau diizinkan, kalau tidak ya kami siap, Pak Ketua. Terus untuk satu lagi untuk (...)

129. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, terus?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: AHMAD LEKSONO

Pak Ketua untuk softcopy Pihak Terkait, kemarin belum sempat diserahkan, izin nanti kami akan serahkan segera.

131. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti Majelis akan meneliti satu persatu karena tanda terimanya juga ada jam apa segalanya, ya. Nanti kami akan teliti, ya. Ya, silakan saja tapi putusannya nanti pada Majelis, nanti akan diteliti, ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon.

133. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari mana ini?

134. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Termohon.

135. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon, ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Apakah memungkinkan untuk jawaban Termohon ada beberapa tambahan beberapa data terkait dari data dari Papua Barat.

137. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tambahan data?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Ya.

139. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan saja kalau tambahan bukti, ya silakan saja nanti di Panel, ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Terkait dengan jawaban Termohon di dalam jawaban boleh atau langsung nanti?

141. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Langsung nanti di Panel ya, langsung nanti di Panel.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Baik.

143. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena kalau tambah-tambah terus sekarang susah kita untuk memverifikasinya, ya.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM NASUTION

Terima kasih.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANTONI HATANE

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

146. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, he em. Dari mana lagi?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANTONI HATANE

Dari Golkar, Yang Mulia.

148. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Golkar?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANTONI HATANE

Ya. Untuk Dapil Maluku, kebetulan kan daerahnya kepulauan. Jadi yang tadi kami cuma ingin dipertegas saja, Yang Mulia. Yang sahkan alat bukti surat hari ini, apakah sahkan yang sudah dimasukkan? Karena masih ada tambahan. Itu saja, Yang Mulia (...)

150. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: ANTONI HATANE

Tambahannya untuk DPR RI sama Provinsi.

152. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi gini biar tidak terulang-ulang, ya. Saudara-Saudara masih bisa mengajukan tambahan bukti nanti di Panel, ya. Kita mau sahkan dulu yang ada sekarang, ya. Itu prinsipnya, ya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Partai Nasdem, Yang Mulia.

154. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari Nasdem, ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Sebelum disahkan daftar bukti, kami ingin menyampaikan bahwa kami ada perbaikan daftar bukti karena ada ... ada yang ... ada penomoran yang berbeda, apakah bisa kami lakukan ketika di Panel nanti, Yang Mulia?

156. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Ada penomoran yang tidak cocok dengan antara bukti dengan daftar bukti. Apakah bisa kami lakukan di dalam Panel?

158. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti di Panel saja untuk perbaikan.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

160. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di Panel saja. Nanti dengan merujuk daftar yang sudah dimasukkan ya, perubahannya di mana. Cukup, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Izin, Yang Mulia.

162. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia.

164. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dari PDIP.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: SIRRA PRAYUNA

Saya mau minta klarifikasi dari Yang Mulia, berkaitan dengan pertanyaan Pemohon tadi untuk Termohon Papua mengenai dimasukkannya data dengan barang bukti. Kalau ... apakah data yang dimaksudkan itu dipresepsikan menjadi membuat suatu konstruksi

hukum baru, peristiwa hukum baru atau hanya alat bukti Yang Mulia? Ini yang mesti diklarifikasi karena kalau seperti itu maknanya, kami tentu bisa saja memasukan kembali data baru. Kami mohon izin Yang Mulia. Terima kasih.

166. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Alat bukti yang dimaksud, alat bukti ya, data alat bukti maksudnya. Ini jelas ya. Ini jangan memperluas-perluas sendiri nanti repot urusannya, ya. Baik, kita mulai dari ... oh, masih ada ya, ya, lupa tadi, ya. Mik, mik.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Dari Gerinda, Yang Mulia.

168. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Tadi kami dapat teguran dari pendaftaran untuk Wilayah Kaltim DPR RI bahwa atas nama Budi belum masuk. Jadi sejak awal kita sudah masukan dalam permohonan ... itu saja, di website juga sudah ada, Yang Mulia. Jadi penegasan, Yang Mulia, untuk nama Budi DPR RI.

170. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti akan kita cek ya, akan kita cek gimana. Karena semua ada dokumennya di (...)

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Ya (...)

172. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di Kepanitraan. Baik, masih ada, cukup? Ya, ya, terakhir lah ini ya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon petunjuk, Yang Mulia. Sebelum pengesahan bukti Pemohon kami diminta menyetorkan tambahan bukti pada hari Jumat. Jadi kami mohon petunjuk, Yang Mulia.

174. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Siapa yang suruh tambahan bukti, siapa?

175. KUASA HUKUM PEMOHON:

Dari penerimaan registrasi ... permohonan, ada di pasang di situ pengumuman.

176. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi begini sepanjang (...)

177. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia.

178. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sepanjang yang sudah masuk di sini berarti sudah diterima, ya. Tapi kalau belum, kalau belum ada di sini, Saudara bisa tambahkan nanti pada saat Panel, ya. Tidak akan ada yang ... yang ... yang diabaikan, ya.

Baik, kita mulai dari partai nomor ... Perkara Nomor 1, untuk Aceh, ya, Aceh. Pemohon mengajukan bukti P-121 sampai dengan P-12 ... maaf P.1.2.1 sampai dengan P.1.2.47. Kemudian P.1.3.1 sampai dengan P.1.3.45, kemudian P.1.4.1 sampai dengan P.1.4.52, kemudian P.1.5 sampai dengan P.1.17 ya. Kemudian itu tadi Aceh 2 untuk DPRA, itu dari Nasdem ya. Untuk Nagan Raya 1 DPRK, Pemohon mengajukan bukti P.1-2 sampai dengan bukti P-1.43, ya. Kemudian Nagan Raya 2, P.1-2 sampai dengan P.1.43. Kemudian Nagan Raya 3, P.1-2 sampai dengan P.1.43.

Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi mengajukan bukti P.1-1 sampai dengan P.1-16. Kemudian Nias Selatan 1, P.1-1 sampai dengan P1 sampai dengan 17. Kemudian Sumatera Barat, Sumatera Barat 2 DPR RI, P.1.1 sampai dengan P.1.19. Sumatera Barat 4, P.1.1 sampai dengan P.1.19. Kemudian Sumatera Barat 5, P.1.1 sampai dengan P.1.16. Kemudian Solok Selatan 1, P.1 sampai dengan P.1.27.

Ya, maaf ya jadi catatan ini untuk Nasdem supaya tidak lihat keterangannya. Jadi untuk Nias Selatan 1, P.1, P1-1 sampai dengan P1-17 nomor didaftar bukti tidak sesuai dengan alat bukti fisik, ya. Saudara catat di situ. Kemudian Sumatera Barat tadi, Sumatera Barat 5 untuk DPRD Provinsi, ada ini P.1.1 sampai dengan P.1.16 ada bukti fisik yang tidak sesuai dengan daftar bukti, yaitu P. ..., P1.11, ya. Kemudian di Solok Selatan, di Solok Selatan ada bukti 2 nomor didaftar bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti fisik, yaitu P.1.13 dan P.1.17. Ini untuk Saudara catat, Saudara perbaiki, ya.

Ya, Jambi. Pasaman Barat, Pasaman Barat 3 ya, P.1 sampai dengan P.1.5 ya. Jambi, P.1-1 sampai dengan P.1-26 Jambi 1 itu, provinsi. Sungai Penuh 1 DPRD Kabupaten, P, P1-1 sampai dengan P1-12. Sungai Penuh 2, P1-1 sampai dengan P1-4, kemudian Sungai Penuh 3, P1-1.

Sumatera Selatan, Sumatera Selatan 10, P1 sampai dengan P14. Bengkulu, Bengkulu 3, P1.1 sampai dengan P1.15, kemudian Bengkulu 7, P1.1 sampai dengan P1.17. Kemudian Lampung, P1.01 sampai dengan P1.21, catatan bukti tidak lengkap. Bukti P1.17 dan P1.18 bukti fisiknya tidak ada.

Kemudian DKI Jakarta untuk DPR RI, P1 sampai dengan P2, kemudian P1.3 sampai dengan P1.12. Kemudian Jakarta 6, P1 sampai dengan P2. Kemudian Jawa Barat, P1.1 sampai dengan P1.87, kemudian P1-1 sampai dengan P1.20. Kemudian Bandung 6 DPRD Kota, P1.1 sampai dengan P1 12. Catatan untuk Sukabumi 5, bukti tidak lengkap. Bukti P1 sampai dengan P5, bukti fisik tidak ada.

Atau begini saja, ringkasnya begini. Ini terlalu banyak ini baca satu-satu, ya. Ringkasnya begini, ya, yang saya sampaikan hanya catatan saja kemudian yang tertulis di sini Saudara bisa ambil di Kepaniteraan, ya. Begitu juga dengan yang lain, ya. Ini kelamaan ini baca ini, ya.

Untuk Banten, ini Nasdem, ya. Untuk Banten, tidak ada bukti tersendiri untuk Banten 3, bukti hanya merujuk ke bukti DKI Jakarta, ya, ini catatannya. Kemudian untuk Jawa Tengah, Jawa Tengah ... untuk Jawa Tengah 5, Surakarta, Sukoharjo dan Boyolali bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti, ya. Sudah dicatat, ya. Kemudian untuk NTB ... NTB Lombok Timur ... Lombok Timur 1 DPRD kabupaten, alat bukti tidak lengkap sesuai daftar bukti. Bukti yang tidak ada yaitu P1.1 ini bukti fisik maksudnya, kemudian P1.5 kemudian P1.7, P1.11, P1.13, P1.16, P1.18, P1.23, P1.32 dan P1.34 tidak ada bukti fisiknya. Kemudian Kalimantan Barat ... Kalimantan Barat alat bukti tidak sesuai dengan daftar bukti, bukti fisik tidak sesuai dengan alat bukti. Kalimantan Barat 6 ini. Provinsi. Kemudian Kalimantan Selatan untuk Banjar 1, ya, untuk Banjar 1 alat ... ada alat bukti tidak sesuai daftar bukti, ya, yaitu P1.2 ... alat buktinya P-1.2 tapi tidak sesuai daftar bukti, ya. Kemudian Sulawesi Tengah Pak Regi Motong... Pak Regi Motong 4, urutan daftar bukti tidak sesuai

dengan alat bukti, yaitu P-2 sampai dengan P-14. Kemudian Sulawesi Selatan ada bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yaitu bukti P-1.10 kemudian... Kolaka bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti, ya, ya itu saja untuk Nasdem. Saya pikir gini saja, ya, saya tanda tangan di sini sah, ya, nanti Saudara ambil saja dengan catatan ini di Kepanitraan tidak perlu saya bacakan lagi seluruhnya, ya, dianggap dibacakan, ya.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Setuju ... setuju, Yang Mulia.

180. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Setuju, ya. Ini habis waktu juga urusan baca ini., ya.
Mana fakta yang lain?

181. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Partai 02 apa? Tidak apa-apa.

Ini yang ada di sini... PBB, ya. PBB ini daftarnya ada, ya, nanti Saudara bisa ambil ke Panitera, ya. Jadi enggak dibacakan, ya. Golkar, ya. Partai Golongan Karya... juga dianggap dibacakan. Ya, ini Partai Hanura, ya, Partai Hanura, ya, ambil di Kepanitraan. Apa lagi? PKB, ya, sama ambil di Kepanitraan. Ya, PKS sama, juga semua ada masalahnya ini, jadi bukan Nasdem saja yang ada masalah bahkan yang lain lebih banyak ini.

Apa lagi?

PPP juga dianggap dibacakan. Ya, Demokrat. Nanti kasih, kasih Pemohonnya, ya. Ya, Partai Amanat Nasional. PDI Perjuangan, nanti ambil di Kepanitera. PKPI, Gerindra.

Masih ada, ya. Oh, Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, ya.

Ya. PDA, Partai Damai Aceh. Seluruhnya sudah, ya. Ya, jadi setelah ini Saudara-Saudara Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sidang selanjutnya dilanjutkan nanti malam, ya. Pukul 19.00 WIB untuk ... putusan sela, ya. Pukul 19.00 WIB, ya. Sekali lagi nanti malam lanjutkan Pleno untuk putusan sela. Kemudian juga nanti malam akan diumumkan yang akan diperiksa pada hari Jumat, ya. Ya, (suara tidak terdengar jelas) provinsi apa saja dan partai apa saja yang diperiksa pada hari Jumat, ya.

Baik. Jelas, ya. Dengan demikian sidang selesai dan nyatakan di (...)

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Yang Mulia. Sebentar-sebentar sedikit saja. Terkait dengan persiapan untuk pemeriksaan saksi pada Jumat, kami ada ingin menghadirkan saksi dari Bawaslu?

183. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya (...)

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: TAUFIK BASARI

Apakah kita ajukan pada hari ini (...)

185. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ajukan permohonan. Jadi begini ada 2 model saksi Bawaslu ini, bisa langsung Mahkamah tapi kalau Saudara merasa sangat berkepentingan itu lang ... minta, ya. Permintaan tertulis, ya. Kepada Mahkamah, ya. Ya.

Dan bisa juga tanpa permintaan Saudara, Mahkamah kami minta keterangan dari Bawaslu, ya. Jelas, ya. Baik dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 28 Mei 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.